

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KECAMATAN DAN KABUPATEN BOJONEGORO

Gyska Indah Harya

gyskaharya.agribis@upnjatim.ac.id

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini antara lain: mengetahui capaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro dilihat dari aspek, mengetahui upaya-upaya peningkatan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian IPM Kabupaten Bojonegoro, membandingkan angka IPM Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan mengetahui disparitas level Kecamatan serta keterkaitan antara input, proses, dan output Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Nilai IPM Kabupaten Bojonegoro bila menurut UNDP termasuk kedalam tingkat pembangunan “sedang”. Dengan nilai tersebut IPM Kabupaten Bojonegoro berada pada peringkat ke-26 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan posisi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada seluruh indikator penyusun IPM. Indeks kesehatan yang diwakili dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat naik yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 71,36 tahun dibandingkan tahun sebelumnya masih sebesar 71,07 tahun. Selanjutnya Indeks pendidikan yang diwakili oleh dimensi naik dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah (HLS) menjadi 12,35 tahun, dan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 7,09 tahun dibandingkan tahun 2019. Indeks daya beli yang diwakili oleh dimensi pengeluaran juga naik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita per tahun menjadi 10.052 juta .

Kata kunci : UNDP, Disparitas, Indeks.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan manusia adalah sebuah proses dan hasil yaitu proses memperbesar pilihan orang tetapi juga menjadi tujuan. Pembangunan manusia mengimplikasikan bahwa orang harus mempengaruhi proses yang membentuk kehidupan mereka. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana penting bagi pembangunan manusia, namun tidak pada akhirnya. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan kemampuan manusia, oleh masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang membentuk kehidupan dan masyarakat dengan memperbaiki kehidupan mereka. Ini lebih luas daripada pendekatan lain, seperti pendekatan sumber daya manusia, pendekatan

kebutuhan dasar dan pendekatan kesejahteraan manusia. Indeks Pembangunan Manusia gabungan (IPM) mengintegrasikan tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Harapan hidup saat lahir mencerminkan kemampuan untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat. Tahun bersekolah dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan mencerminkan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Dan pendapatan nasional bruto per kapita mencerminkan kemampuan untuk mencapai standar kehidupan yang layak. (*Human Development Report Office*).

Perkembangan manusia adalah tentang memperoleh lebih banyak kemampuan dan menikmati lebih banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuan itu. Dengan kemampuan dan kesempatan lebih, orang memiliki lebih banyak pilihan, dan memperluas pilihan merupakan inti dari pendekatan pembangunan manusia. Tapi perkembangan manusia juga sebuah proses. Terangkai dalam Hak Asasi Manusia, terkait dengan keamanan manusia. Dan tujuan utamanya adalah untuk memperbesar kebebasan manusia. Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, bagi masyarakat melalui penjabaran manfaat pembangunan dalam kehidupan dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang mempengaruhi dan membentuk kehidupan mereka. Penghasilan adalah sarana untuk pembangunan manusia tapi bukan tujuan itu sendiri. Pendekatan pembangunan manusia dalam Human Development Report 1990 juga memperkenalkan Indeks Komposit, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk menilai pencapaian dalam dimensi dasar pembangunan manusia. Dimensi perkembangan manusia itu untuk menjalani hidup yang panjang dan sehat, diukur dengan harapan hidup saat lahir; untuk mendapatkan pengetahuan, diukur dengan rata-rata tahun sekolah dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan; dan untuk mencapai standar kehidupan yang layak, diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita.

UNDP (*United Nation Development Programme*) memberikan ukuran terhadap keberhasilan pembangunan manusia yakni dengan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM merupakan Indeks Komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Indeks Standar Hidup Layak yang tertuang dalam Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*). Sejak otonomi daerah, maka setiap daerah diharapkan untuk mengetahui ukuran IPM daerahnya sendiri baik untuk keperluan perencanaan maupun untuk evaluasi khususnya dalam mengetahui perkembangan dan sebaran hasil-hasil pembangunan bidang manusia.

Rumusan Masalah

Pengukuran keberhasilan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro perlu diukur dengan angka IPM. Angka ini dapat menunjukkan sejauh mana tingkat pencapaian pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur hal tersebut maka penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

1. Seberapa besar pencapaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro dilihat dari aspek: tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk?

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro
(Gyska Indah Harya)

2. Bagaimana upaya-upaya peningkatan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Bojonegoro?
3. Bagaimana perbandingan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur?
4. Bagaimana Disparitas level kecamatan serta keterkaitan antara input, proses, dan output pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Bojonegoro?
5. Bagaimana kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan Sumber Daya Manusia di kabupaten Bojonegoro?

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 bermaksud memberikan gambaran umum bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengenai kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan tujuan umum dari kegiatan ini adalah:

1. Pembangunan manusia yang akan dilakukan tepat sasaran.
2. Bahan evaluasi pembangunan manusia sehingga keputusan- keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang dapat menguntungkan semua pihak.
3. Menumbuhkan kebiasaan pada pihak penentu kebijakan agar menggunakan data dalam mengambil keputusan terutama dikaitkan dengan upaya perencanaan berbasis kinerja

Sedangkan tujuan khusus secara rinci berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Mengetahui capaian komponen IPM Kabupaten Bojonegoro dilihat dari aspek: tingkat kesehatan penduduk, tingkat pendidikan dan pengetahuan penduduk serta kemampuan daya beli (standar kelayakan hidup) penduduk.
2. Mengetahui upaya-upaya peningkatan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaiannya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengetahui perbandingan angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
4. Mengetahui disparitas level Kecamatan serta keterkaitan antara input, proses, dan output Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pengertian IPM yang dikeluarkan oleh UNDP yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara.

Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu; angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli/paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI). Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan sumber daya manusia secara sempurna.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report 1993: 105-106)

1. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate.
2. *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 tahun ke atas (*the mean years of schooling*).
3. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan manusia antar wilayah dan antar waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan presentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga faktor yaitu: kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli.

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 negara pada tahun 1990, rangking HDI (Human Development Index) semua negara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu

1. Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (low human development) bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.
2. Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (medium human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
3. Negara dengan pembangunan manusia yang tinggi (high human development) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0.

Dapat disimpulkan bahwa Negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79 dapat dikatakan bahwa negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan manusianya, sedangkan Negara dengan nilai HDI 0,8 berarti negara tersebut sangat memperhatikan pembangunan manusianya.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya:

- Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Indeks pembangunan manusia merupakan Indeks Dasar yang tersusun dari dimensi-dimensi: (1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, (2) Pengetahuan, yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan (3) Standar hidup yang layak, dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- Sangat Tinggi : IPM > 80
- Tinggi : IPM antara 70 < IPM < 80
- Sedang : IPM antara 60 < IPM < 70
- Rendah : IPM < 60

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, antara lain:

- Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non-pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah Negara, bukannya pertumbuhan ekonomi
- Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu Negara. Bagaimana dua Negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
- Untuk memperlihatkan perbedaan di antara Negara-Negara, di antara Provinsi- Provinsi (atau Negara Bagian), di antara Gender, Kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai Negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Studi

Kegiatan Penyusunan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 ini meliputi lokasi seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.

Jenis dan Sumber Data

Dilihat dari sumbernya, data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.

Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya data kependudukan, pendidikan dan ekonomi.

Data-data yang sudah diuraikan dimuka akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
4. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap metode baru dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita. Perbedaan indikator antara metode lama dan metode baru perhitungan IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH) Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Agregasi	Rata-rata Aritmatik $IPM = \frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$	Rata-rata Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro
(Gyska Indah Harya)



Sumber: United Nations Development Programme

Gambar 1.

Perjalanan Metode Penghitungan IPM di UNDP

Perhitungan Indeks Komponen IPM

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut. (BPS, 2016).

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\text{min}}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\text{min}}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\text{min}}}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Menghitung IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Pada tabel 4 berikut disajikan nilai-nilai tersebut.

Tabel 2.

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro
(Gyska Indah Harya)

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPPUS)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPPUS)	26.572.352** (Rp)

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2015, BPS 2016

Keterangan:

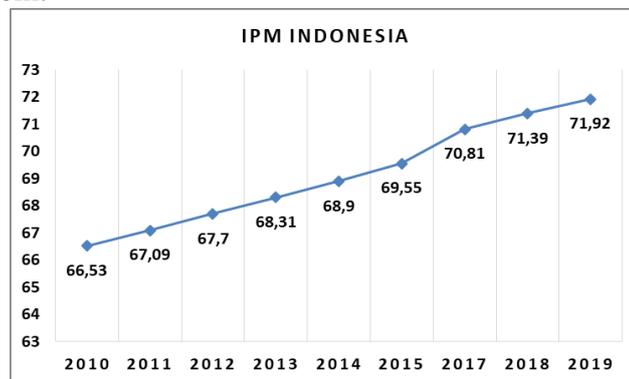
** Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2019 hanya sebesar 71,92 atau masih di bawah target yang dicangginkan Presiden Jokowi yakni 71,98. Meski demikian, capaian tersebut naik dari tahun 2015 yang berada angka 69,55. Selama 5 tahun memimpin, kenaikan IPM di era pertama pemerintahan Presiden Jokowi sendiri sudah mengalami kenaikan 2,37 poin.



Sumber: BPS data diolah

Gambar 1.

Perkembangan IPM Nasional

Sejak 2010, IPM Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan. Namun dalam lima tahun terakhir laju peningkatan pertumbuhan IPM agak melambat dibandingkan dengan periode 2011-2014. Untuk periode 2015-2019, IPM naik rata-rata 0,86% per tahun, sedangkan pada 2011-2014 IPM naik 0,88% per tahun. Bayi yang lahir pada tahun 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,34 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.

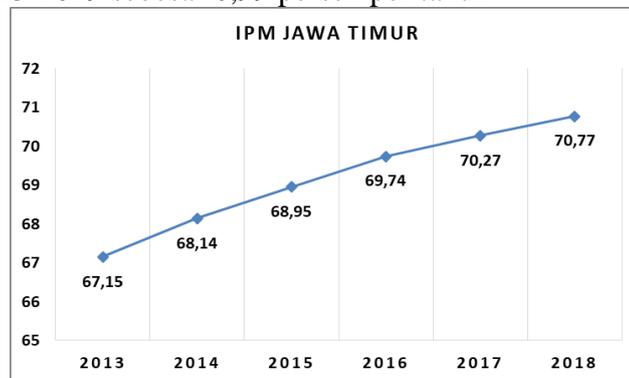
Anak-anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,95 tahun (hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I), lebih lama 0,04 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2018. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun

(hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX), lebih lama 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) sebesar 11,30 juta rupiah per tahun, meningkat 240 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Jawa Timur kontinu mengalami kemajuan selama periode 2013- 2019. Dari 67,55 (2013) meningkat menjadi 71,50 (2019) atau selama periode tersebut tumbuh 5,85 persen. Rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2013-2019 sebesar 0,99 persen per tahun



Sumber : BPS data diolah

Gambar 2.
Perkembangan IPM Jawa Timur

Ini menunjukkan upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Keberhasilan ini ditunjukkan perubahan kategori untuk beberapa wilayah. Kabupaten Sidoarjo yang semula pembangunan manusianya berkategori “tinggi” pada tahun 2019 naik kelas menjadi “sangat tinggi”. Kabupaten Blitar, Ponorogo, Ngawi dan Kabupaten Malang juga naik kelas dari pembangunan manusia berkategori “sedang” menjadi kategori “tinggi”. Pemerintah Jawa Timur terus berupaya meningkatkan kinerja pembangunan manusianya, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah di Jawa Timur. Wilayah yang mempunyai IPM tergolong “sedang” diupayakan untuk mencapai kategori “tinggi”.

Indeks Pembangunan Manusia Bojonegoro

Tingkat pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro yang digambarkan oleh IPM, pada tahun 2012 sebesar 64.2 dan terus meningkat hingga tahun 2017 sebesar 67.28. Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, pertumbuhan tertinggi IPM terjadi pada tahun 2015 sebesar 0.9 poin. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2015, IPM tahun 2014 telah terjadi peningkatan sebesar 1,25 persen. IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 66,73 kemudian pada tahun 2017 menjadi 67,28 dan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 67,85. Peningkatan ini secara konsisten juga terjadi pada tahun 2019,

hingga 68,75. Peningkatan angka IPM tersebut menandakan arah pembangunan daerah yang mulai berpihak kepada peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012-2019

IPM dan Komponennya	IPM	AHH	EYS	MLS	RPP (dalam ribuan)
2012	64.2	69.98	11.74	5.8	8.809,44
2013	64.85	70.07	12.04	5.9	8.934,19
2014	65.27	70.11	12.08	6.14	8.963,65
2015	66.17	70.51	12.09	6.64	8.993,21
2016	66.73	70.67	12.11	6.65	9.420
2017	67.28	70.83	12.34	6.71	9.553
2018	67,85	71,07	12,35	6,77	9.926
2019	68,75	71,36	12,36	7,09	10.265

Sumber: BPS data diolah

Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia untuk masing-masing kecamatan, bisa diuraikan sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Misalnya, angka harapan hidup umur sepuluh tahun, berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan datang dijalani oleh mereka yang telah mencapai usia sepuluh tahun. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah atau Negara.

Usia harapan hidup juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan umur harapan hidup waktu lahir. Meningkatnya umur harapan hidup waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 9

Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah (Earn Years School) dan Rata- Rata Lama Sekolah (Mean Years School), dan Konsumsi Rumah Tangga Per bulan Tiap Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	AHH	HLS	RLS	Konsumsi RT
1	Ngraho	71,15	12,54	6,95	9875
2	Tambak Rejo	72,77	12,44	7,11	9945
3	Ngambon	73,42	12,31	7,22	9683
4	Ngasem	73,57	12,31	7,07	9225
5	Bubulan	71,15	12,36	7,11	10862
6	Dander	70,53	12,47	7,76	9875
7	Sugihwaras	72,52	12,03	7,02	10785
8	Kedungadem	71,45	12,52	7,22	9980
9	Kepohbaru	70,53	12,34	7,75	9748
10	Baureno	72,77	12,4	7,35	9905
11	Kanor	73,16	12,27	7,53	9898
12	Sumberrejo	73,40	12,13	7,07	9931
13	Balen	70,53	12,18	7,75	9238

*Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro
(Gyska Indah Harya)*

No	Kecamatan	AHH	HLS	RLS	Konsumsi RT
14	Kapas	73,33	12,23	7,07	10485
15	Bojonegoro	71,53	12,52	8,97	11035
16	KAlitidu	73,16	12,12	7,54	9520
17	Malo	73,19	12,36	7,34	10162
18	Purwosari	72,02	12,12	7,53	10278
19	Padhangan	73,09	12,23	7,35	9925
20	Kasiman	73,33	12,17	7,03	9783
21	Temayang	71,45	12,26	7,35	9895
22	Margomulyo	71,53	12,27	7,35	9895
23	Trucuk	72,02	12,04	7,62	9761
24	Sukosewu	71,45	12,23	7,35	9331
25	Kedewan	73,19	12,54	7,22	9945
26	Gondang	71,53	12,33	7,07	9898
27	Sekar	71,86	12,45	7,07	9473
28	Gayam	70,53	12,03	7,02	9520

Dari tabel diatas terlihat capaian Angka Harapan Hidup di Kecamatan Ngasem yang paling tinggi yakni, 73,57. Sedangkan terendah ada di Kecamatan Kedungadem 70,53.

b. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bojonegoro sebagai wilayah yang terletak pada pusat Kabupaten, jelas memiliki Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang cukup tinggi di dibandingkan dengan kecamatan lain, yakni 12,52 untuk HLS dan 8,97 untuk RLS. Kesadaran akan kebutuhan pendidikan sudah sangat jelas nampak. Sedangkan yang terendah untuk HLS ada di Kecamatan Gayam yakni 12,03. Ini berarti bahwa di Kecamatan Bojonegoro, masyarakatnya di harapkan bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tahun ke 12,92 atau hampir setara dengan Diploma I.

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Bojonegoro sebagai wilayah yang terletak pada pusat Kabupaten, jelas memiliki Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah yang cukup tinggi di dibandingkan dengan kecamatan lain, yakni 12,52 untuk HLS dan 8,97 untuk RLS. Kesadaran akan kebutuhan pendidikan sudah sangat jelas nampak. Sedangkan yang terendah untuk HLS ada di Kecamatan Gayam yakni 12,03. Ini berarti bahwa di Kecamatan Bojonegoro, masyarakatnya di harapkan bisa menyelesaikan pendidikannya hingga tahun ke 12,92 atau hampir setara dengan Diploma I.

c. Daya Beli (Purchasing Power Parity)

Kemampuan daya beli, bisa di ukur dari pengeluaran rumah tangga dalam

1 bulan. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa hasil pemerataan pembangunan sedikit lebih tampak. Konsumsi rumah tangga terbanyak di keluarkan oleh masyarakat Kecamatan Bojonegoro, sedangkan yang terendah oleh Kecamatan Ngasem.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bojonegoro sendiri mengalami lonjakan karena didukung adanya sektor migas. Dana penerimaan migas Bojonegoro tak seluruhnya dibelanjakan dalam satu tahun berjalan. Sebagian disisihkan sebagai dana abadi. Dana tersebut disimpan dan hanya dimanfaatkan bunganya saja. Pemanfaatannya antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia serta untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Sehingga meskipun bertumpu pada sektor migas, namun laju pertumbuhan ekonomi tetap berjalanimbang. Di sini Kabupaten Bojonegoro di nilai cerdas dalam mengelola pendapatan dari migas.

d. Indeks Pembangunan Manusia Tiap Kecamatan

Setelah mengetahui capaian masing-masing indicator pada tiap kecamatan, maka berikut adalah capaian IPM untuk tiap kecamatan.

Tabel 12.

Capaian IPM Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	2019	2020*
1	Ngraho	67,85	68,28
2	Tambak Rejo	67,75	69,17
3	Ngambon	68,84	69,18
4	Ngasem	66,78	68,55
5	Bubulan	68,51	69,23
6	Dander	68,61	68,97
7	Sugihwaras	67,91	69,29
8	Kedungadem	67,64	68,86
9	Kepohbaru	66,92	68,69
10	Baureno	67,48	69,40
11	Kanor	67,04	69,66
12	Sumberrejo	67,52	69,03
13	Balen	67,18	67,97
14	Kapas	68,23	69,66
15	Bojonegoro	70,12	72,12
16	Kalitidu	68,59	69,11
17	Malo	69,19	69,79
18	Purwosari	69,09	69,37
19	Padhangan	68,78	69,38
20	Kasiman	68,67	68,84
21	Temayang	67,89	68,66
22	Margomulyo	68,01	68,70
23	Trucuk	67,35	68,88
24	Sukosewu	67,52	68,03
25	Kedewan	70,02	69,61
26	Gondang	68,64	68,40

27	Sekar	68,45	68,24
28	Gayam	66,98	67,18

Sumber: Data Lapangan Diolah

Dari Tabel di atas, terlihat Kecamatan Bojonegoro meraih pencapaian IPM tertinggi dari kecamatan lain yakni sebesar 72,12. Sebagai wilayah sekaligus pusat Pemerintahan, tentu saja membuat kemudahan dalam akselerasi akses peningkatan pembangunan sumber daya manusia di tempatnya. Capaian IPM terendah ada di Kecamatan Gayam yakni 68,03. Disparitas antar kecamatan tidak seberapa memperlihatkan *gap* yang lebar kecuali *Gap* untuk yang terendah dan tertinggi, yakni 4,09 poin.

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

- Sangat Tinggi : IPM \geq 80
- Tinggi : IPM antara $70 \leq$ IPM $<$ 80
- Sedang : IPM antara $60 \leq$ IPM $<$ 70
- Rendah : IPM $<$ 60

Dengan demikian, capain IPM di semua kecamatan semuanya tergolong dalam kategori Sedang. Karena hampir semua angka berada di atas 60. Dan ada 6 Kecamatan dengan kategori tinggi.

Dari komponen pendukung IPM yang sudah di uraikan pada sub bab sebelumnya, bidang pendidikan yang layak mendapatkan perhatian utama. Di butuhkan kebijakan-kebijakan program yang bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, agar perolehan indeks pendidikan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap capaian IPM secara keseluruhan.

Kemudian setelah muncul angka IPM dari semua kecamatan yang sudah di sampaikan di atas, maka nilai proyeksi yang di dapat untuk Kabupaten adalah adalah 69,01. Ada peningkatan sebesar 0.26 poin dari tahun 2019. Dengan demikian, semua sektor pendukung IPM baik ekonomi, kesehatan dan terutama pendidikan harus di tingkatkan agar capaian berikutnya bisa signifikan. Selain berbagai formulasi kebijakan harus di ambil dalam rangka peningkatan capaian tersebut, ketersediaan data yang akurat dan tepat juga menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam melakukan analisa situasi dan kondisi pembangunan yang telah berlangsung. Sehingga kebijakan yang di ambil bisa sesuai dengan kebutuhan dan bisa menjadi solusi yang tepat bagi peningkatan capaian IPM Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan datang.

STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Ide dasar dari pembangunan manusia cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Dengan berbekal konsep ini, tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengamatan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro selama periode tahun 2017-2019 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Selama kurun waktu 2017 hingga 2019, pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Nilai IPM Kabupaten Bojonegoro bila menurut UNDP termasuk kedalam tingkat pembangunan “sedang”. Dengan nilai tersebut IPM Kabupaten Bojonegoro berada pada peringkat ke-26 dari 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan posisi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya.
2. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan pada seluruh indikator penyusun IPM. Indeks kesehatan yang diwakili dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat naik yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) menjadi 71,36 tahun dibandingkan tahun sebelumnya masih sebesar 71,07 tahun. Selanjutnya Indeks pendidikan yang diwakili oleh dimensi naik dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah (HLS) menjadi 12,35 tahun, dan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 7,09 tahun dibandingkan tahun 2019. Indeks daya beli yang diwakili oleh dimensi pengeluaran juga naik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita per tahun menjadi 10.052 juta .
3. Pada Tahun 2020 Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro di proyeksikan sebesar 69,01, terjadi peningkatan pada 2 indikator penyusun IPM yaitu Indeks pendidikan dan indek kesehatan, sementara indek daya beli mengalami sedikit penurunan. Dimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Pendidikan

Indek pendidikan di capai dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah (HLS) yang di proyeksikan menjadi 12,37 tahun, dan rata-rata lama sekolah (RLS) menjadi 7,26 tahun Tantangan bidang pendidikan masih tetap sama yakni pada pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian juga tingkat partisipasi masyarakat yang melanjutkan pendidikan tingkat atas yang masih rendah. Ada beberapa kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya berpendidikan terakhir SD dan SMP saja. Untuk itu di perlukan upaya keras dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan tingkat atas.

Berkaitan dengan pandemi, kebijakan yang diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan sistim BDR (Belajar dari rumah), dan untuk ini bantuan kuota belajar juga sudah di luncurkan. Tetapi muncul kendala seperti:

- Siswa yang kurangberuntung yang umumnya bersekolah di sekolah negeri yang berlokasi di wilayah desa, rentan mengalami penurunan kemampuan belajar (*learning loss*). Hal ini disebabkan, misalnya dalam sistim daring kurang adanya interaksi antara guru dan murid
- Kesenjangan juga terjadi antar siswa dalam satu kelas, siswa dengan kemampuan diatas rata-rata cenderung memiliki akses terhadap fasilitas BdR yang lebih baik dan orang tua yang lebih memperhatikan proses belajar.
- Akses Internet itu sendiri yang bisa menjadi hambatan dalam sistim daring

(karena terletak di daerah susah sinyal)

b. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli yang diwakili oleh dimensi pengeluaran juga naik yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran per kapita per tahun, 2020 di proyeksikan menjadi 10,025 juta rupiah. Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengerahkan segala potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor non migas agaknya bisa mulai dirasakan dampaknya. Salah satunya adalah pembentukan sentra pengembangan ekonomi dan industri, baik dari segi pertanian, ekonomi kreatif dan pariwisata. Sudah banyak lokasi-lokasi yang bermunculan sebagai objek wisata baru, baik wisata edukasi maupun wisata agro. Hal ini masih di tambah lagi dengan gencarnya pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten yang tentu saja di harapkan bisa mendongkrak jalur distribusi agar lebih efektif dan efisien. Namun demikian masih perlu di pertimbangkan lagi mengenai masalah investasi dan pemasaran. Mengenai pemasaran, rata-rata yang dilakukan masyarakat Bojonegoro masih klasik tradisional, sehingga pasar yang terjangkau belum maksimal. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh PemKab, yaitu berupa mengadakan pelatihan untuk memasuki dunia market place, membuka pameran hingga berpartisipasi dalam kegiatan bazar pemasaran produk di kota-kota besar. Aktivitas seperti ini di harapkan tetap di lakukan secara konsisten, dan di sertai dengan inovasi-inovasi untuk bisa menembus pasar yang lebih luas.

Akan tetapi capaian pada tahun 2020 di proyeksikan bakal menurun, dikarenakan situasi khusus akibat dampak pandemi covid 19. Meskipun perekonomian global mengalami keterpurukan, akan tetapi untuk kabupaten Bojonegoro yang bertumpu pada sektor pertanian, masih bisa bertahan karena pandemic berakibat besar pada sektor industri dan jasa, serta pariwisata.

c. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan yang diwakili dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat di proyeksikan mengalami sedikit peningkatan angka harapan hidup (AHH) sebesar 0,07 poin menjadi 71,95 tahun dibandingkan tahun sebelumnya masih sebesar 71,36 tahun. Namun demikian masih ada pekerjaan rumah yang menunggu yakni:

❖ ASI Eksklusif

- Cakupan bayi yang telah mendapatkan ASI eksklusif mengalami peningkatan, namun jika di lihat cakupan per kecamatan, terdapat disparitas yang cukup lebar. Dimana ada puskesmas yang cakupannya 100% bayi sudah di beri
- ASI Eksklusif, namun ada kecamatan yang hanya 40% saja. Pemberian ASI eksklusif ini sangat penting, karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak supaya terhindar dari kondisi *stunting*.

4. Pada tahun 2020, seluruh wilayah Indonesia bahkan juga dunia, tegah dihadapkan pada situasi dan kondisi pandemi dari virus covid 19. Keberadaan virus ini telah mempengaruhi seluruh elemen kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk didalamnya pendidikan dan kesehatan. Keberadaan pandemi ini bahkan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh Bapak Presiden.
5. Munculnya pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa: (1) Perhatian ke

penanganan bencana non-alam masih terbatas, termasuk bencana kesehatan seperti penanganan pandemi Covid-19. (2) Dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, (1) Penduduk perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan memiliki risiko bencana tinggi. (2) Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi *economic loss* yang besar.

6. Meskipun pandemi covid 19 menjadi pemicu semua persolan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tapi nyatanya tidak menjadikan Kabupaten Bojonegoro menjadi terpuruk terutama soal pangan. Di karenakan potensi sektor pertanian yang luar biasa, maka Kabupaten Bojonegoro bis abertaha menghadapi permasalahan yang di akibatkan pandemi untuk saat ini. Namun demikian, karena hingga akhir tahun 2020 pandemi masih belum berakhir di khawatirkan dampak yang lebih buruk akan terjadi pada tahun berikutnya sehingga perlu di buat kebijakan antisipatif untuk kondisi di tahun mendatang

Rekomendasi

1. Konsep pembangunan manusia tidak berdiri sendiri sebagai sesuatu yang eksklusif. Konsep pembangunan yang ada harus berkaitan dengan konsep pembangunan manusia. Dan pembangunan manusia bukan hanya produk dari pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus merupakan input penting untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan secara simultan.
2. Perlu kebijakan dan program pembangunan yang terencana dalam menentukan dan memilih prioritas atas kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan manusia dapat tepat sasaran. Berdasarkan indeks pada setiap komponen pembentuk IPM, terlihat bahwa pembangunan manusia kedepannya yang perlu diprioritaskan adalah pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Adapun dukungan kebijakan dapat di fokuskan sebagai berikut:

a. Dimensi Pendidikan

- Peningkatan partisipasi sekolah penduduk di tingkat pendidikan menengah pertama dan menengah atas, perlu pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendidikan, misalnya penambahan unit sekolah terutama untuk menengah atas.
- Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik, salah satunya dengan inovasi pada metode belajar mengajar sehingga mampu mencetak peserta didik bisa menjadi SDM yang berkarakter dan unggul serta siap bersaing dalam persaingan global.
- Menjalin kerjasama yang lebih erat dunia pendidikan dan industri agar tercetak tenaga SMK yang terampil dan siap untuk bekerja.
- Memperluas cakupan bantuan dana pendidikan yang sudah di programkan secara konsisten dan tepat sasaran.
- Berkaitan dengan pandemi covid – 19
 - Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah perlu memberikan intervensi khusus kepada para guru agar ketimpangan kemampuan belajar tidak semakin melebar.
 - Perlu adanya panduan bagi para guru agar dapat lebih memperhatikan keragaman kemampuan murid dalam kelasnya dan dukungan

peningkatan kemampuan mengajar untuk dapat melakukan pendekatan pengajaran berdasarkan kebutuhan setiap murid.

b. Dimensi Kesehatan

Paradigma sehat bisa dijadikan salah satu strategi pembangunan kesehatan, dimana mengarah kepada mempertahankan kondisi sehat dan tidak sakit serta produktif yang dikenal dengan upaya promotif dan preventif ketimbang upaya kuratif yang hanya menekankan pada upaya penanganan orang-orang sakit. Sehingga upaya program kesehatan yang diperlukan adalah program kesehatan yang lebih “efektif” yaitu program kesehatan yang mempunyai model-model pembinaan kesehatan (Health Development Model) sebagai paradigma pembangunan kesehatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan. Health Development Model, bercirikan:

- Mempersiapkan bahan baku sumber daya manusia yang berkualitas untuk 20-25 tahun mendatang.
- Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia yang ada.
- Melindungi masyarakat luas dari pencemaran melalui upaya promotif-preventif-protektif dengan pendekatan pro-aktif.
- Memberi pelayanan kesehatan dasar bagi yang sakit.
- Promosi kesehatan yang memungkinkan penduduk mencapai potensi kesehatannya secara penuh (peningkatan vitalitas) penduduk yang tidak sakit agar lebih tahan terhadap penyakit. Promosi bisa dilakukan dengan berbagai media dan metode yang bisa mudah di aplikasikan oleh masyarakat.
- Pencegahan penyakit melalui imunisasi : bumil (ibu hamil), bayi, anak, dan juga melindungi masyarakat dari pencemaran.
- Pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan serta perlindungan masyarakat terhadap pengaruh lingkungan buruk (melalui perubahan perilaku).
- Penggerakan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dan bekerja secara sehat.
- Pendekatan multi sektor dan inter disipliner.
- Pengembangan kebijakan yang dapat memberi perlindungan pada kepentingan kesehatan masyarakat luas (misalnya, tidak merokok di tempat umum).
- Berkaitan dengan pandemi covid 19, maka di perlukan penguatan kebijakan untuk:
 - **Penguatan Germas (Promotif dan Preventif)**, Air bersih, sanitasi, cuci tangan pakai sabun, olahraga, kesehatan, lingkungan, kawasan sehat
 - **Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM Kes, seperti** Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di Puskesmas Pemenuhan vaksin & obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS).

c. Dimensi Standar Hidup Layak

- Peningkatan dukungan bagi penguatan usaha industri rumahtangga kecil dan menengah, kepariwisataan, pengembangan perdagangan dan sistem distribusi, pengembangan ekspor, pengembangan koperasi dan UKM dan memberdayakan kemampuan usaha masyarakat miskin.

- Upaya pengembangan lapangan pekerjaan dapat dimulai dengan: Pemberian kemudahan dalam hal regulasi untuk kegiatan investasi, seperti pelayanan dan perijinan satu atap, regulasi untuk perlindungan tenaga kerja lokal dalam hal penentuan upah minimum kabupaten dan pengendalian stabilitas harga-harga kebutuhan pokok masyarakat sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.
- Mengajak masyarakat untuk lebih produktif dan inovatif dalam memanfaatkan potensi lingkungan sekitar sehingga bisa bernilai ekonomis yang kemudian memberikan dukungan dan fasilitas sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut.
- Berkaitan dengan pandemi covid -19:
 - Mengawal dan menjamin aktivitas pertanian tetap berjalan, termasuk pengawalan distribusi pupuk dan benih
 - Stimulus pemodalannya terutama bagi industri sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM
 - Bantuan untuk sektor non informal
 - Menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah
 - Validasi data penduduk miskin dan rentan miskin untuk berbagai skema bantuan
 - Pengawalan program Bantuan Sosial Pusat dan peningkatan cakupan melalui Bantuan Sosial Daerah
 - Operasi pasar murah *online*

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2018. Indeks Pembangunan Manusia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kabupaten Bojonegoro.2018. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- BPS Kabupaten Bojonegoro.2018. Produk Domestik Bruto Kabupaten Bojonegoro Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2018. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.
- BPS Kabupaten Bojonegoro 2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro 2018.
- Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.BPS Propinsi Jawa Timur (2018). Berita Resmi Statistik: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- BPS Propinsi Jawa Timur (2017). Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2018. Surabaya: BPS Jawa Timur.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Profil Kesehatan 2018

*Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan dan Kabupaten Bojonegoro
(Gyska Indah Harya)*

Human Development Report (1990). Published for the United Nations Development Program (UNDP). New York, Oxford: Oxford University Press

Human Development Report (2016). Published for the United Nations Development Program (UNDP). New York, Oxford: Oxford University Press

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Melliana, A dan Ismaini Zain. 2013. Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. Jurnal Sains dan Sni Pomits Vol. 2, No.2.

Setiawan dan Dwi Endah Kusri.2010. Ekonometrika. ANDI, Yogyakarta